



PIDATO MENTERI KEUANGAN
POKOK-POKOK TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP
PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI
MENGENAI RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2023
JAKARTA, 20 AGUSTUS 2024

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

1. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2023.

2. Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR-RI atas pandangan dan masukan terhadap RUU P2 APBN TA 2023 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 9 Juli 2024 lalu. Pandangan dan masukan ini sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara masa depan. Di dalam Rapat Paripurna ini, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, yang telah disampaikan Juru Bicara masing-masing fraksi, yaitu:
- a. **Marinus Gea, S.E., M.Ak.** mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan);
 - b. **Dr. Dave Akbarsyah Fikarno Laksono, M.E.** mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar);
 - c. **H. Rahmat Muhajirin, S.H.** mewakili Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra);
 - d. **H. Fauzi H. Amro, M.Si** mewakili Fraksi Partai NasDem (F-Partai Nasdem);
 - e. **Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.** mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB);
 - f. **Bramantyo Suwondo, M.M.IR.** mewakili Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat);
 - g. **Dr. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol** mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS);
 - h. **H. Boyman Harun, S.H.** mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); dan
 - i. **H. Iip (iip) Miftahul Khoiry, S.Pd.** mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

3. Dalam sepuluh tahun terakhir, perekonomian global bergerak sangat dinamis. Berbagai guncangan menciptakan tantangan yang kompleks dan tidak mudah bagi perekonomian global. Pandemi Covid-19 menjadi yang terberat, meluluhlantakan dunia, mengancam keselamatan jiwa, menggoyang pilar-pilar perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Alhamdulillah Indonesia mampu merespons tantangan tersebut dengan tepat dan efektif. Salah satunya melalui kolaborasi solid antara Pemerintah dan DPR, untuk melindungi segenap lapisan masyarakat.
4. Meredanya pandemi Covid-19 pada tahun 2023 tidak serta merta diikuti pemulihan kinerja ekonomi global. Risiko ketidakpastian masih tinggi dan tantangan datang silih berganti. Eskalasi tensi geopolitik yang dipicu perang di Ukraina, Palestina, dan ketegangan di kawasan Asia telah menimbulkan fragmentasi global dan disrupti rantai pasok yang luar biasa. Memicu volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, kenaikan suku bunga serta pelemahan nilai tukar.
5. Bank sentral di berbagai negara pun merespons dengan kenaikan suku bunga acuan dalam rangka meredakan tekanan inflasi. Namun demikian, inflasi masih berada pada level tinggi. Ekonomi global mengalami *debt distress* dan perlambatan pertumbuhan pun terjadi.
6. Bagi Indonesia, pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 memberikan sinyal positif dan membangkitkan optimisme untuk akselerasi pemulihan. Hal ini sekaligus menjaga momentum reformasi struktural untuk penguatan fondasi ekonomi.

7. Namun demikian ditengah ketidakpastian global yang eskalatif, Indonesia memahami bahwa diperlukan upaya mitigasi melalui:
 - a. Optimalisasi APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi;
 - b. Penguatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan; dan
 - c. Disiplin pengelolaan fiskal dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dengan pengendalian defisit dan utang, pendalaman pasar keuangan serta pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian.
8. APBN yang sehat dan kredibel menjadi modal kokoh untuk mendukung agenda pembangunan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
9. Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah bersama DPR dan masyarakat Indonesia, kinerja APBN 2023 terus membaik dengan disiplin fiskal terus dijaga. Hal ini ditunjukkan antara lain dari *revenue ratio* yang tinggi, keseimbangan primer yang positif, defisit yang lebih terkendali, serta rasio utang yang menurun.

Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Yang kami hormati,

10. Pada tahun 2023 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatatkan beberapa capaian khusus sebagai dampak dari kinerja positif perekonomian antara lain:
 - a) Keseimbangan primer yang positif pertama kali sejak 2012;
 - b) Surplus Laporan Operasional pertama kali sejak penerapan basis akrual pada tahun 2015;
 - c) Kenaikan ekuitas tanpa revaluasi pertama kali sejak tahun 2015.
11. Pada tahun 2023 pengelolaan transaksi APBN juga lebih baik. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai nilai terendah yaitu Rp19 Triliun sejak 2008. Dan untuk pertama kalinya, Transaksi Antar Entitas (TAE) bernilai nihil, menunjukkan semakin baiknya Pemerintah dalam mengelola APBN sehingga semua transaksi dapat terkonsolidasi dan diidentifikasi dengan baik.
12. Dengan berbagai kebijakan yang ditempuh dan pengelolaan APBN yang sehat, perekonomian Indonesia resilien menghadapi berbagai guncangan. Terkendalnya inflasi berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat, sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tetap berada di atas 5%, yakni 5,05%.
13. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi tahun 2023 terkendali di level 2,6% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,5% (yoy). Laju inflasi Indonesia ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia di level 7,4%, Turki di level 64,8%, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4% (yoy).

14. Kinerja makro fiskal Indonesia tahun 2023 juga menunjukkan hasil yang baik. Defisit fiskal semakin terkendali di kisaran 1,61% PDB dan rasio utang secara bertahap didorong semakin menurun, di kisaran 39,2% terhadap PDB.
15. Melalui reformasi struktural yang disertai pengelolaan fiskal yang sehat kesejahteraan masyarakat di tahun 2023 meningkat. Tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,86% di tahun 2022 menjadi 5,32% di tahun 2023. Selain itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54% menjadi 9,36%; serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang kami hormati,

16. Pemerintah sangat menghargai respon positif dari **F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, dan F-PAN** terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 5,05%.
17. Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai komponen konsumsi masyarakat yang hanya mampu tumbuh 4,82% (yoy), hal ini dikarenakan efek rambatan pandemi sehingga kondisi masih dalam masa pemulihan. Namun, aktivitas konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,82% tersebut menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil di tengah ketidakpastian perekonomian global.
18. Pemerintah juga berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh **F-PKS** mengenai pertumbuhan ekonomi 2023 yang belum mencapai target 5,3%. Kondisi perekonomian pada periode pemulihan pasca Covid-19 masih menjadi tantangan, diwarnai dengan konflik geopolitik, fragmentasi, *supply disruption*, dan level inflasi global yang tinggi.

19. Kondisi ini membatasi perekonomian global tumbuh di level 3,3% pada tahun 2023. Melemahnya aktivitas perekonomian global berimplikasi terhadap penurunan signifikan pada kinerja ekspor Indonesia, baik dari sisi volume maupun harga. Kinerja ekspor Indonesia tahun 2023 mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan sebesar 1,3% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,2% (yoy). Tekanan ekspor berimplikasi cukup besar pada PDB mengingat kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 21,4%.
20. Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PKB** bahwa inflasi inti mencerminkan daya beli masyarakat. Untuk itu, Pemerintah selalu melakukan pemantauan pergerakan inflasi inti secara rutin. Pada saat inflasi inti dalam tren menurun di awal tahun 2023, Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menjaga daya beli masyarakat. Hasil pemantauan terkini, inflasi inti saat ini sudah mulai mengalami perbaikan, berbagai indikator konsumsi seperti penjualan mobil-motor, konsumsi semen, dan listrik menunjukkan penguatan.
21. Menanggapi pandangan **F-PKS, F-Partai Demokrat, F-Partai Nasdem, F-PAN**, terkait inflasi yang terjaga stabil dalam rentang sasaran target $3\pm 1\%$. Dapat kami sampaikan bahwa inflasi tahun 2023 sebesar 2,61% merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir, di luar periode pandemi. Pemerintah terus menjaga stabilitas harga dengan kerangka pengendalian inflasi yang komprehensif, melalui Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K). Pemerintah mengendalikan harga pangan antara lain dengan melakukan stabilisasi pasokan melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, dan kebijakan impor yang terukur.

22. Pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
23. Pemerintah sependapat dengan **F-Partai Nasdem** agar melakukan pendalaman pasar keuangan domestik sehingga *yield* SBN semakin efisien untuk mengendalikan *debt to service ratio* pemerintah. Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dilakukan secara konsisten oleh pemerintah dan dikoordinasikan bersama dengan Bank Indonesia, LPS, OJK dalam strategi nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan. Hal ini didasarkan upaya mendorong terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid sehingga dapat mendorong efisiensi pembayaran bunga utang pemerintah.
24. Menanggapi pandangan dari **F-PKS**, Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat suku bunga SBN akan menjadi salah satu beban dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu, Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan fiskal yang *prudent* dan sehat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menjaga fundamental perekonomian domestik dan stabilitas makroekonomi, termasuk kinerja SBN dengan menjaga penerbitan dan pembayaran *yield* SBN sesuai jadwal yang telah diperhitungkan dengan cermat.
25. Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait harga ICP, dapat kami sampaikan bahwa volatilitas harga minyak mentah dunia dipengaruhi dinamika geopolitik serta tingkat permintaan minyak dari beberapa negara utama (seperti Tiongkok, Eropa, dan AS) dan penawaran dari produsen minyak mentah.

26. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri cenderung meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi, sementara di saat yang sama realisasi *lifting* minyak mentah di Indonesia terus turun. Namun demikian, belanja APBN akan terus dioptimalkan sebagai stabilisator dan *shock absorber* sehingga tidak menimbulkan gejala perekonomian yang mengganggu pencapaian target pembangunan.
27. Pemerintah berterima kasih atas catatan yang disampaikan oleh **F-PDI Perjuangan, F-Partai Golkar, F-PAN dan F-PKB** berkaitan dengan *tax ratio*. Pemerintah akan terus berupaya menjaga dan meningkatkan *tax ratio* yang telah dicapai pada tahun 2023. Dalam upaya ini, Pemerintah menghadapi tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, *tax ratio* Indonesia dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya efisien. Dari sisi eksternal, Pemerintah menghadapi tantangan situasi global yang menantang. Ketidakpastian akibat fragmentasi geoekonomi dan proteksionisme yang menekan laju perdagangan dan investasi berpotensi menghambat pertumbuhan yang dapat berimplikasi kepada penerimaan negara.
28. Menanggapi pandangan **F-Partai Nasdem** untuk terus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain melalui evaluasi atas metode penyampaian SPT Tahunan yang semula *paper-based* menjadi *electronic-based* serta pengembangan e-Faktur serta bukti potong elektronik (e-Bupot).

29. Dapat kami sampaikan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2023 mencapai 88%, atau 17,1 juta Wajib Pajak dari 19,4 juta Wajib Pajak yang wajib lapor. Capaian ini meningkat dari realisasi tahun 2022 sebesar 86,8%.
30. Kami berterima kasih atas dorongan **F-Partai Demokrat** untuk terus melakukan reformasi perpajakan yang sudah disepakati bersama dengan DPR melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan histori data sejak tahun 2020, Indonesia mengalami kenaikan angka *tax ratio* setiap tahunnya, yaitu 8,32% di tahun 2020, kemudian 9,12% di tahun 2021, meningkat kembali menjadi 10,39% di tahun 2022, dan sedikit tertahan pada tahun 2023 di angka 10,31%. Kondisi ini dikontribusi oleh penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai karena dampak kebijakan pengendalian konsumsi rokok dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok, menurunnya nilai impor, serta menurunnya harga komoditas CPO.
31. Berkenaan dengan pandangan **F-PDI Perjuangan** agar Pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai Belanja Pemerintah Pusat TA 2023, dapat disampaikan bahwa dalam mengalokasikan anggaran belanja K/L, Pemerintah senantiasa berpedoman pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN, Prioritas Nasional, dan RKP.
32. Pada tahun 2023, belanja Pemerintah diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan perlindungan sosial, antara lain: Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 18,1 juta penerima; Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 916,8 ribu mahasiswa; Pemberian tunjangan profesi untuk 227,5 ribu guru non PNS; Tunjangan khusus dan insentif bagi 348,9 ribu guru dan kepala sekolah non PNS di bawah Kemdikbudristek dan Kemenag.

33. Prioritas belanja pendidikan juga diberikan kepada penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Di bidang perlindungan sosial, belanja diprioritaskan antara lain untuk penyaluran kartu sembako dan BLT *El Nino* untuk 18,8 juta KPM, serta kartu prakerja untuk 1,1 juta peserta.
34. Pemerintah berterima kasih kepada **F-Partai Golkar**, **F-PAN** dan **F-Partai NasDem** terhadap pandangan mengenai serapan anggaran belanja Pemerintah yang tinggi sebesar 100,13%. Anggaran Belanja Pemerintah pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
35. Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **F-Partai Demokrat** bahwa belanja negara harus mampu memperkuat perekonomian domestik serta meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Pemerintah senantiasa berupaya untuk memastikan agar pelaksanaan belanja negara dilakukan dengan hati-hati (*prudent*), namun tetap responsif dan antisipatif terhadap tantangan perekonomian. Masih cukup kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di angka 4,82% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan belanja negara mampu berperan sebagai *shock absorber* sehingga dampak fluktuasi guncangan dalam perekonomian dapat dikendalikan dengan baik.
36. Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra** dan **F-PKS** bahwa Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan serius ke sektor pertanian, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah tetap melanjutkan perhatian khusus terhadap sektor tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program dukungan terhadap petani guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

37. Dukungan tersebut antara lain melalui: (i) penyaluran subsidi pupuk yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga yang terjangkau; (ii) program bantuan langsung benih unggul (BLBU) yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang bersertifikat; (iii) penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian; serta (iv) pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk penyediaan kebutuhan air di musim kemarau.
38. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan murah bagi UMKM/petani melalui fasilitas subsidi bunga KUR sebesar Rp2,6 triliun yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi petani/UMKM, yang terutama difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perdagangan dan jasa, dan sektor industri pengolahan.
39. Pemerintah sependapat dengan **F-Partai Demokrat** agar Pemerintah dapat mengelola defisit dengan baik untuk mendukung terjaganya keberlanjutan fiskal nasional. Pada tahun 2023, rasio defisit terhadap PDB terkendali pada level 1,61% yang merupakan inflasi terendah sejak Tahun 2012. Pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN pada batas aman sesuai dengan UU Keuangan Negara yaitu maksimal sebesar 3% dari PDB dan menjaga rasio utang terhadap PDB berada di bawah 60%.
40. Pemerintah juga sepakat dengan **F-PPP** dan **F-PKS** agar Pemerintah mengelola utang secara *prudent* sehingga target defisit tetap terjaga. Hal ini dilakukan searah dengan kebijakan pemerintah untuk pembiayaan kreatif. Kebijakan ini diharapkan mengendalikan pembiayaan utang sehingga kesinambungan fiskal tetap terjaga. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan non

utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa risiko utang pemerintah sampai dengan 2023 masih dalam batas aman terkendali, dengan rasio utang terhadap PDB di angka 39,2%.

41. Atas pandangan dari **F-PPP** agar pemerintah menggunakan SiLPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban, Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan memenuhi kewajiban yang tertunda antara lain melalui optimalisasi penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan APBN.
42. Berkenaan dengan tanggapan **F-Partai Golkar** agar Pemerintah menjelaskan lebih detail mengenai kebijakan penggunaan SAL tahun 2023, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran, penggunaan SAL pada tahun 2023 adalah Rp35 triliun. Dengan penggunaan SAL tersebut, pada akhir tahun 2023 dihasilkan SiLPA sebesar Rp19,38 triliun, turun signifikan jika dibandingkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp130,6 triliun.
43. Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal. Sisa SAL yang belum digunakan akan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas (*liquidity buffer*) untuk tahun anggaran berikutnya.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

44. Menanggapi pandangan dari **seluruh fraksi** agar Pemerintah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK serta perbaiki kualitas penyajian laporan keuangan bagi K/L yang tidak memperoleh opini WTP, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjuti dan berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK dengan rencana aksi yang rinci dan terukur dalam jangka waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Pemerintah juga melakukan *monitoring* atas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu pengukuran kinerja Pemerintah.
45. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Fraksi-Fraksi DPR RI kepada Pemerintah, yaitu dalam mempertahankan opini WTP atas LKPP selama delapan kali berturut-turut sejak Tahun 2016.
46. Pemerintah sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi di DPR-RI, yang telah mendukung dan bekerja sama mengawal perjalanan APBN pada periode ini.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang kami hormati,

47. Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

48. Tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI secara lebih rinci, kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan Fraksi-Fraksi DPR-RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
49. Sekali lagi, kita semua pantas bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah membimbing kita semua melalui masa-masa sulit di masa pandemi dan menghadapi tantangan perekonomian global. Semoga pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2023 ini menjadi akhir yang baik bagi kita semua, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat untuk membangun bangsa, memenuhi janji dan cita-cita Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, *Baldatun, Thoyyibatun wa Robbun Ghofur*.

Wallohul muwaffiq ila aqwamith-thoriq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Om shanti shanti shanti om, Namo Buddhaya,

Merdeka!

Jakarta, 20 Agustus 2024

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,**

ttd

Sri Mulyani Indrawati